SIRD #103
SOCIAL INVESTMENT ROUNDTABLE DISCUSSION

Social Investment Indonesia

FREE

DAPATKAN GIVEAWAY !

Kupas Tuntas Laporan IFRS S1-S2

Narasumber:



Retnia Wulandari, SE, MSc, CertSF
Manajer, Direktorat Keuangan Berkelanjutan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



Fitria Leli
ESG Risk and Reporting Manager
PT PLN (Persero)



Prof. Juniati Gunawan, M.Si., Ph.D.
Head of Trisakti Sustainability Center



Jalal
Chairperson of Advisory Board
Social Investment Indonesia

Host:



Nur Astri Mufthia S.
Associate
Social Investment Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026

15.00 - 17.00 WIB

socialinvestment.id

0813-8808-511

Via zoom @SocialInvestment_Id

SIRD #103
SOCIAL INVESTMENT ROUNDTABLE DISCUSSION

Social Investment Indonesia

Kupas Tuntas Laporan IFRS S1-S2



Retnia Wulandari, SE, MSc, CertSF
Manajer, Direktorat Keuangan Berkelanjutan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Professional Experience:

- ***Manajer/Analis pada Direktorat Keuangan Berkelanjutan OJK yang berfokus pada pengembangan kebijakan, infrastruktur, pemantauan implementasi, dan kerja sama pemangku kepentingan.***
- ***Terlibat dalam penyusunan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan, Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia, serta persiapan adopsi IFRS S1 dan IFRS S2.***
- ***Mendapat penugasan dalam FSAP Indonesia untuk bidang Climate-related Risks and Opportunities serta berkontribusi dalam penyusunan pedoman NGFS.***
- ***Delegasi Indonesia pada Sustainable Finance Working Group, Presidensi G20 India, 2023.***
- ***Peserta Climate Finance Program dari Wealth Management Institute dan Temasek Foundation, 2024.***
- ***Berpengalaman dalam pengaturan dan pengembangan pengawasan perbankan syariah.***
- ***Mengawali karier di PT Angkasa Pura I (Persero).***

Educational Experience

- ***S1 – Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) (2013)***
- ***S2 – Master of Science on Islamic Banking, Finance and International Business dari University of Dundee, UK (2023***

socialinvestment.id



Kebijakan dan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan OJK

Disampaikan pada Social Investment Roundtable Discussion
Jakarta, 28 Agustus 2026

Direktorat Keuangan Berkelanjutan (DUKB)
Departemen Surveillance dan SJK Terintegrasi (DSKT)
Otoritas Jasa Keuangan | 2026

OJK's *Journey* terkait Keuangan Berkelanjutan

2015 - 2021

- **Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I** (2015 -2019)
- **POJK 51/2017** tentang **Penerapan Keuangan Berkelanjutan** bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik
- **POJK 60/2017** tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan **(*Green Bond*)**
- Insentif **Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB)**
- **Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II** (2021-2025)
- ***Task Force* Keuangan Berkelanjutan Sektor Jasa Keuangan**

2022 - 2023

- **Taksonomi Hijau Indonesia (THI) Edisi 1.0**
- ***Consultative Paper* Prinsip Manajemen Efektif Atas Risiko Keuangan terkait Iklim**
- Dukungan **Perusahaan Pembiayaan dan Perasuransian** dalam mendukung **Program KBLBB** hingga tahun 2023
- **POJK 14/2023** tentang Perdagangan Karbon melalui **Bursa Karbon**
- **POJK 17/2023** tentang Penerapan **Tata Kelola bagi Bank Umum,** khususnya mengenai **risiko iklim**
- **POJK 18 /2023** tentang Penerbitan dan Persyaratan **Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) Berlandaskan Keberlanjutan**

Perkembangan 2024 - 2026



- **Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) Versi 1.**
- Penerbitan dan implementasi ***Climate Risk Management & Scenario Analysis*** **(CRMS) dan *pilot project*.**
- **Accelerator Program untuk EBUS Berkelanjutan/Tematik (insentif)**
- **Pengakuan SF Indonesia masuk pada Fase *Maturing* (sejak 2021) oleh SBFN (fase tertinggi)** dan ***Country Progress Reports* 2025 Indonesia bersama 6 negara lain tetap mempertahankan statusnya pada level *Maturing***
- Peluncuran **Perdagangan Karbon Internasional (Januari 2025)**
- **TKBI Versi 2: Februari 2025** Cakupan sektor: ***Construction & Real Estate (C&RE), Transportation & Storage (T&S),* dan sebagian AFOLU.**
- **TKBI Versi 3: Februari 2026 (*Complete Version*)**
  Fokus Sektor: *Agriculture, Forestry, Fishery* (AFF), *Manufacturing, Water Sewerage, Waste Management and Remediation* (WSSWMR). Enabling Sector: Professional, Scientific, Technical Activities and Information Communication.
  Peluncuran Taxonomy Navigator





- **Banking Sustainability Maturity Asessment Report (SMART)**
- **Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA)**
- ***Roadmap* Pasar Modal Berkelanjutan Indonesia 2026–2030**

What's next...

OJK-*wide*

- Pengkinian **POJK 51/2017** tindak lanjut UU P2SK dan adopsi PSPK 1 dan PSPK 2 (sejalan dengan **IFRS S1 dan S2)**
- **Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Keuangan Berkelanjutan (bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia)**
- Penyusunan panduan ***transition plan***
- **Digitalisasi sistem pelaporan** (TKBI, emisi GRK, SR).
- Pengembangan ***Centralized Database*** terkait SF
- *Sustainable Finance Information Hub* (SFIH) dengan penambahan *tools/fitur a.l* ***Taxonomy Navigator, CRMS fitur perhitungan emisi Scope 1-3, Climate Scenario*** dan ***Projected Climate Data.***
- Terlibat aktif dalam **ASEAN Taxonomy Board untuk implementasi dan peninjauan ASEAN Taxonomy.**
- **Pelaksanaan sosialisasi, seminar, *capacity building* SF**

OJK-*sectoral*

Perbankan, antara lain:

- Penerbitan **panduan CRMS versi 2 dan *pilot project***
- Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA) vol. 2 2027
- **Pengembangan *Indonesia Policy (IP) Scenario***
- **Kajian *Transition Finance***
- Kajian Pengembangan Skema Pembiayaan Perbankan di Sektor Kehutanan dan Konstruksi
- Kajian pengembangan dan pengukuran data iklim

PMDK, antara lain:

- *Accelerator* Program for ***Thematic Bonds and Sukuk Issuance***
- **Revisi KDK 24/2018** Untuk Memperluas Insentif Untuk **Obligasi dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan**
- Pengembangan ekosistem dan pengawasan **bursa karbon**

PPDP, antara lain:

- Penyusunan **Roadmap Berkelanjutan** di PPDP
- **Pedoman Implementasi Keuangan Berkelanjutan** bagi PPDP
- **Kajian *Feasibility* Penerapan CRMS** bagi PPDP

PVML, antara lain:

- **Pedoman Implementasi Keuangan Berkelanjutan** bagi PVML
- **Pemetaan dan Pengembangan Produk Sustainable Finance**

Posisi Pengungkapan Keberlanjutan dalam Ekosistem Keuangan Berkelanjutan Indonesia

OTORITAS JASA KEUANGAN

Target *Net Zero Emission* (NZE) Global 1.5◦C tahun 2050

Target NZE Indonesia 2060 *or sooner*

***Second NDC*, LTS-LCCR*, RPJPN, RPJMN**

Diimplementasikan melalui kebijakan sektoral

Kebijakan dan Regulasi Keuangan Berkelanjutan Nasional
(a.l UU No. 16/2016 Ratifikasi Paris Agreement, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Peta Jalan Dekarbonisasi Sektor Riil

Market Signal

Penurunan Emisi



Industri Sektor Riil

Investasi dan pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung dekarbonisasi



Lembaga Jasa Keuangan

Infrastruktur (Sistem dan Data)

- *Perhitungan emisi GRK (Scope 1,2,3)*
- Digitalisasi Pelaporan RAKB dan SR
- Digitalisasi pelaporan portofolio hijau (TKBI) dan Emisi GRK
- Pengembangan *Indonesia Policy Climate Scenario (CRMS)*
- *Enhancement data* proyeksi *risk event (CRMS)*
- Profesi Pendukung (assuror, verifikator, dll)

Mempertimbangkan

Climate Risk Mitigation
***Climate Risk Management & Scenario Analysis* (CRMS)**
Manajemen dan pengukuran risiko iklim dan peningkatan resiliensi LJK

Produk dan Instrumen Keberlanjutan
- Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) berlandaskan Keberlanjutan
- *Sustainability Loan, Sustainability Linked-Loan*
- Asuransi Parametrik, Asuransi Karbon, dll

Pembiayaan aktivitas berkelanjutan

Sustainable Finance Taxonomy
Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI)
Panduan klasifikasi aktivitas ekonomi berkelanjutan

Akan diatur dalam Peraturan Pemerintah tindak lanjut UU P2SK

Infrastruktur Karbon
Pasar Primer dan Bursa Karbon
TKBI mencakup aktivitas penangkapan dan penyimpanan karbon

Panduan Penilaian Aktivitas Berkelanjutan

***Transition Plan* (TP)**
TKBI akan digunakansebagai acuan dalam melakukan transisi / dekarbonisasi, dan identifikasi alokas pembiayaan berkelanjutan
TKBI menggunakan TP sebagai salah satu Technical Screening Criteria (TSC)

Pengungkapan Keberlanjutan / Sustainability Disclosure



UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Standar Internasional
IFRS S1 dan S2



Standar Nasional
PSPK 1 dan 2



RPOJK Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik

Kewajiban pengungkapan

**Note: Second NDC (Second Nationally Determined Contributions) LTS-LCCR (Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience).*

Latar Belakang Perubahan POJK 51/2017

Perkembangan nasional dan standar global terkait keberlanjutan mengarah pada kebutuhan untuk mengkinikan POJK 51/2017…

OJK
POJK 51/2017

POJK 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik

UU PPSK

Jan 2023

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Penerapan Keuangan Berkelanjutan (Pasal 222)

PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik

1. PUSK, emiten, dan perusahaan publik **menerapkan Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan usahanya.**
2. PUSK, emiten, dan perusahaan publik dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan **melakukan:**
   a. praktik bisnis dan strategi investasi yang **mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola;** dan
   b. pengembangan produk, transaksi, dan jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi.
3. PUSK, emiten, dan perusahaan publik harus **membangun kapasitas dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan.**
4. **PUSK, emiten, dan perusahaan publik menyusun laporan keberlanjutan sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan.**

Regulator

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur oleh **otoritas sektor keuangan dan Menteri sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.**

Taksonomi Berkelanjutan (Pasal 223)

Ayat (1)
Dalam rangka pengembangan Keuangan Berkelanjutan, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia melakukan:
d. koordinasi dalam **menyusun taksonomi Berkelanjutan.**

Ayat (2)
Ketentuan mengenai taksonomi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d **diatur dalam Peraturan Pemerintah.**

IFRS-ISSB

Juni 2023

IFRS-ISSB menerbitkan **IFRS S1 *General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information* and IFRS S2 *Climate-related Disclosures.***



IAI

Nov 2023-11 Agustus 2025

Nov 2023 *membentuk*

- **Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DPSK-IAI)**
- **Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia (DSK-IAI)**

Desember 2024 *menerbitkan* **Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (Peta Jalan SPK)**



1 Juli 2025
Pengesahan Standar Pengungkapan Keberlanjutan IAI

11 Agustus 2025
Peluncuran Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1-Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan dan PSPK 2-Pengungkapan terkait Iklim

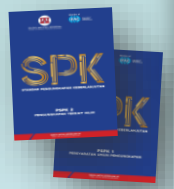

OJK



2024-2026
Penerbitan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai standar klasifikasi aktivitas berkelanjutan



2024
Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS)

Perlu diintegrasikan dalam pengungkapan keberlanjutan

Rancangan POJK dan PADK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan

Adopsi Standar Pengungkapan Keberlanjutan di Nasional melalui PSPK 1 dan 2

Penerbitan PSPK 1 dan 2 dan perubahan paradigma pengungkapan keberlanjutan dan laporan keuangan dari semula "fungsi terpisah" menjadi "terhubung dan terintegrasi".

Paradigm Shift

Cost center	• Alat komunikasi • Akses terhadap pendanaan
Historical information	*Forward looking risk & opportunity*
Sustainability checklist	*Financial impact*
Disconnect:	*Connecting:*
Pengungkapan Keberlanjutan ⟷ Laporan Keuangan	Pengungkapan Keberlanjutan — Laporan Keuangan
Fungsi terpisah:	*Connecting:*
Risk Team, ESG Team	Risk Team, ESG Team
Accounting Team	Accounting Team



Informasi tentang dampak **risiko dan peluang terkait keberlanjutan** terhadap **aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban**.

PSPK 1 tentang Persyaratan Umum Pengungkapan Informasi Keuangan terkait Keberlanjutan





PSPK 2 tentang Pengungkapan terkait Iklim

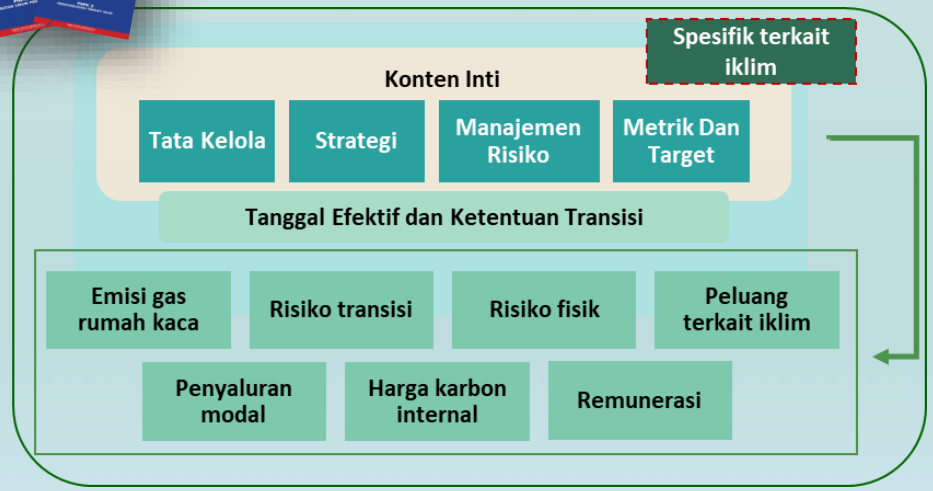

Tanggal Efektif & Ketentuan Transisi

Berlaku efektif pada **1 Januari 2027** dengan opsi penerapan dini.

Dalam **3 tahun pertama sejak penerapan pertama kali:**

- Risiko dan peluang terkait iklim, wajib diungkapkan
- Risiko dan peluang terkait **selain iklim**, diungkapkan sukarela
- Emisi gas rumah kaca Cakupan 3, tidak wajib diungkapkan
- GHG Protocol Standards tidak wajib digunakan sebagai metode untuk mengukur emisi gas rumah kaca

Kerangka Pengaturan RPOJK dan RPADK tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan

Draft masih dalam proses diskusi dan penyusunan

OTORITAS JASA KEUANGAN

Pihak yang Menerapkan Keuangan Berkelanjutan

1. **Lembaga Jasa Keuangan**
2. **Emiten**
3. **Perusahaan Publik**
4. **Pelaku Usaha Infrastruktur Keuangan**
5. **Pihak lain di sektor jasa keuangan** yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Kewajiban Penerapan Keuangan Berkelanjutan

1. menerapkan proses **tata kelola**, pengendalian, dan prosedur untuk memantau dan mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan;
2. menyusun dan melaksanakan **strategi** untuk mengelola risiko dan peluang terkait keberlanjutan termasuk dampak risiko dan peluang terkait keberlanjutan terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas;
3. menerapkan **manajemen risiko** untuk mengidentifikasi, menilai, memprioritaskan dan memantau risiko dan peluang terkait keberlanjutan;
4. melakukan pengukuran **metrik dan target** terkait keberlanjutan;
5. melakukan **praktik bisnis dan strategi investasi** yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup, sosial dan tata kelola;
6. mengembangkan **produk dan/atau jasa** yang mendukung tujuan berkelanjutan termasuk produk, transaksi, dan/atau jasa pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi.
7. membangun **kapasitas** dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan; dan
8. menyusun **pelaporan terkait keberlanjutan** sebagai bagian dari penerapan Keuangan Berkelanjutan.

POJK dan PADK Baru

RAKB dan Laporan Keberlanjutan

1. **Standar Pengungkapan Keberlanjutan PSPK 1 dan PSPK 2**
2. **Aspek Keberlanjutan - *Regulatory Needs* (POJK 51/2017)**
   Aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial

Entitas Pelapor

- **Kelompok 1,2,3**
- **Kelompok Lain**

Target Terbit TW IV 2026

Efektif per 1 Januari 2027

RPOJK

BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II RUANG LINGKUP DAN PRINSIP
BAB III PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN
BAB IV RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN
BAB V LAPORAN KEBERLANJUTAN
BAB V PERHITUNGAN DAN PENGUNGKAPAN EMISI GRK
BAB VI TAKSONOMI BERKELANJUTAN
BAB VII TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BAB VIII VERIFIKASI
BAB IX LAPORAN KEBERLANJUTAN KONSOLIDASI
BAB X PENGECUALIAN
BAB XI INSENTIF
BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP

RPADK

PADK menjadi pedoman penerapan keuangan berkelanjutan sebagai **acuan standar minimum yang harus dipenuhi oleh PUSK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan**

- **Lampiran 1: Entitas Pelapor Kelompok 1, 2, 3 dan Kelompok Lain**
- **Lampiran 2: Format RAKB untuk Kelompok 1,2,3**
- **Lampiran 3: Format RAKB untuk Kelompok Lain**
- **Lampiran 4: Format SR untuk Kelompok 1,2,3,**
- **Lampiran 5: Format SR untuk Kelompok Lain**

Keterangan: SR: Laporan Keberlanjutan/Sustainability Report ; RAKB: Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Highlight Pengaturan RPOJK (1/2)

Draft masih dalam proses diskusi dan penyusunan

1 KOMPETENSI

Pihak di Sektor Jasa Keuangan **wajib memiliki Pejabat Eksekutif dan/atau minimal 1 orang anggota penyusun Laporan Keberlanjutan yang memenuhi kompetensi terkait keuangan berkelanjutan.**

2 *GREENWASHING*

Dalam menyusun SR, pihak **dilarang memberikan informasi, data, dan/atau dokumen secara tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan**.

Contoh:

Pemberian informasi, data, dan/atau dokumen yang tidak benar, palsu, dan/atau menyesatkan dilakukan **secara sengaja** sehingga membuat Laporan Keberlanjutan antara lain:

- menjadi terlihat sebagai ramah lingkungan atau berkelanjutan daripada kenyataannya (***greenwashing***)
- praktik yang berusaha **meningkatkan reputasi perusahaan melalui inisiatif tanggung jawab sosial yang tidak efektif** atau mengejar keuntungan ekonomi dengan **dalih proyek tanggung jawab sosial** (***social washing***)
- produk investasi yang **mengklaim** dapat memberikan **dampak pada ekonomi riil** namun **tidak dapat diverifikasi, diukur, atau *overstated*** (***impact washing***).

3 PERHITUNGAN DAN PENGUNGKAPAN EMISI GRK

1. Pihak di Sektor Jasa Keuangan **wajib melakukan perhitungan dan mengungkapkan informasi terkait emisi gas rumah kaca beserta target pengurangannya.**
2. Perhitungan emisi gas rumah kaca **diterapkan secara bertahap** dengan memperhatikan:
   a. penggunaan **metodologi yang sesuai dengan standar yang berlaku**; dan
   b. perolehan data emisi berdasarkan **pengukuran langsung dan/atau menggunakan pengukuran estimasi** sesuai dengan standar yang berlaku.

4 TAKSONOMI BERKELANJUTAN

1. Kelompok 1, 2, 3 dan kelompok lain **wajib menggunakan klasifikasi dan definisi aktivitas berkelanjutan yang mengacu pada taksonomi berkelanjutan** dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan.
2. **Ketentuan lebih lanjut** mengenai penerapan taksonomi berkelanjutan sesuai format laporan yang diatur dalam PADK OJK.

5 TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN

1. Pihak di Sektor Jasa Keuangan yang diwajibkan **melaksanakan TJSL mengalokasikan sebagian dana TJSL** untuk mendukung kegiatan penerapan Keuangan Berkelanjutan
2. Rencana dan pelaksanaan TJSL yang mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan dituangkan dalam RAKB dan Laporan Keberlanjutan

Highlight Pengaturan RPOJK (2/2)

Draft masih dalam proses diskusi dan penyusunan

6 VERIFIKASI

Kewajiban verifikasi atas SR:
Kelompok 1, 2, dan 3 paling lambat 2 tahun setelah penerapan standar pengungkapan keberlanjutan.

***Voluntary*:**
Kelompok lain

Pihak ketiga independen yang melakukan verifikasi atas SR:

- wajib:
  a. memiliki izin atau bentuk lain setara izin dari kementerian, lembaga, dan/atau otoritas pembina dan pengawas profesi penunjang terkait; dan
  b. terdaftar pada OJK serta tercatat aktif pada daftar Profesi Penunjang di OJK.
- Ketentuan mengenai pendaftaran pihak ketiga mengacu pada ketentuan POJK mengenai profesi penunjang di SJK.

Cakupan awal verifikasi:

- **Tata Kelola**
- **Emisi GRK**
- **TKBI**

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Keputusan Deputi Komisioner

7 LAPORAN KEBERLANJUTAN SECARA KONSOLIDASI

1. Kelompok 1, 2, 3 dan kelompok lain yang menyusun laporan keuangan secara konsolidasi wajib menyusun **Laporan Keberlanjutan secara konsolidasi**.
2. Laporan Keberlanjutan secara konsolidasi **disertai dengan verifikasi**

8 PENGECUALIAN

1. Laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan **opini tidak menyatakan pendapat** (*disclaimer*) terkait dengan ***going concern* internal**;
2. Apabila **membukukan rugi bersih selama tiga tahun berturut-turut** atau memiliki **ekuitas negatif** pada laporan keuangan terakhir;
3. **Tidak membukukan pendapatan** pada laporan keuangan auditan terakhir;
4. Entitas dalam proses **penundaan kewajiban pembayaran utang, pailit,** atau **pembatalan perdamaian**;
5. Dalam proses pemeriksaan namun **sudah tidak memiliki pengurus dan kantor**;
6. **Dalam penanganan permasalahan;**
7. Dalam **tahapan pencabutan izin usaha**; dan/atau
8. **Tidak lagi berada di bawah pengawasan OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Inisiatif OJK dalam persiapan adopsi PSPK 1&2 dan mendorong kesiapan ekosistem pengungkapan keberlanjutan

1 Menyusun Kajian Akademik untuk Persiapan POJK



Ruang lingkup Kajian:

1. ***Industry Readiness Analysis:***
   - *Assessing Current State and Benchmarking*
   - *Mapping The Maturity Level of the Industry*
   - *Mapping Financial Industry Coverage* (perluasan mandat UU P2SK)
   - *Providing Recommendations for Improvement*
2. ***Market Gap Analysis***
   - *Identification of Sectoral Needs Beyond IFRS Standards* (BCBS, POJK 51/2017. GRI, TCFD, SASB, etc)
   - *Identification of Bridging Policy (transition plan, etc)*
3. ***Analyze the latest global and regional updates on IFRS adoption S1 and S2***
4. ***Designing Sustainability Disclosure Framework***
   - *Review Current Gap Analysis (including bridging to future standard S3&S4)*
   - *Develop Sustainability Disclosure Academic Paper*

2 Menyiapkan *Bridging Policies (telah dan sedang dilakukan)*

Kebijakan

1. **Pengembangan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) + *Pilot Project***
2. ***Climate Risk Management & Scenario Analysis* (CRMS) + *Pilot Project***
   Meliputi **aspek tata kelola, strategi, manajemen risiko, dan pengungkapan untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank** dalam menghadapi perubahan iklim.
3. ***Transition Plan Guidance*, membantu entitas menyusun rencana transisi/dekarbonisasi untuk mengurangi emisi dan mengelola *climate risk*** dengan cara memahami komponen transisi dan implikasinya ke proses bisnis, sehingga dapat menyusun strategi yang sesuai. Fokus pada **internalisasi proses transisi dalam aktivitas bisnis organisasi, bukan hanya untuk tujuan pengungkapan *(beyond disclosure purpose)*.**
4. ***Transition Finance Guidance* untuk sektoral**
5. ***Sustainability Maturity Assessment***
6. ***Penyusunan Roadmap SF sektoral***

Infrastruktur & Data

Antara lain:

1. **Digitalisasi pelaporan RAKB dan SR**
2. **Digitalisasi pelaporan portofolio hijau (TKBI) dan emisi GRK melalui APOLO mulai tahun 2026**
3. **Pengembangan *Indonesia Policy Climate Scenario* dan *enhancement* data proyeksi risiko fisik s.d. 2050**

Sumber Daya Manusia

1. **Pelaksanaan *Capacity Building* dengan topik kebijakan keuangan berkelanjutan OJK kepada internal dan industri**
2. **Sosialisasi Kebijakan dan Ketentuan**

Koordinasi & Kolaborasi

Koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di nasional dan internasional:

1. **Komite Keuangan Berkelanjutan**
2. **Kementerian/Lembaga**
3. **Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik**
4. **Asosiasi profesi**
5. **Industri sektor riil**
6. **Lembaga/Fora internasional (NGFS, ATB, IFRS-ISSB, BCBS, IOSCO, SBFN, ITPN, ACMF, WCCMD, AIRM dll)**

Adopsi standar pengungkapan keberlanjutan, Ekosistem Asurans/Verifikasi, metodologi perhitungan emisi GRK, pembangunan *database* dan pengumpulan data terkait keberlanjutan

DSKF OJK

Ekspektasi terhadap Pihak di Sektor Jasa Keuangan

*diharapkan dapat terus **meningkatkan upaya keberlanjutan** dan **menyiapkan sedini mungkin** dengan:*

Organisasi

1. ***Tone from the top*** **terkait penerapan keuangan berkelanjutan**
2. **Penguatan tata kelola dan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan, antara lain:**
   - penetapan **peran dan tanggung jawab** Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja dalam menerapkan dan melaksanakan pengawasan secara efektif
   - **Integrasikan keberlanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan** bisnis dan strategi, bukan hanya fungsi pelaporan
   - Bangun **sinergi dan *cross-functional working group*** antar fungsi Perusahaan, seperti *Sustainability, Finance, Risk Operations,* dan IT
3. **Pembangunan kapasitas dalam rangka menerapkan keuangan berkelanjutan**

Teknis

1. **Membangun fondasi** analisis dan pelaporan untuk mencapai **kualitas *investor-grade***
2. **Identifikasi *sustainability-related risks & opportunities*** menggunakan referensi industri yang relevan (mis. SASB)
3. Menetapkan **metodologi** yang terdokumentasi untuk **implementasi TKBI, pengukuran emisi GRK,** dan metrik material lainnya
4. Melakukan ***climate risk assessment*** **untuk risiko fisik dan iklim**, serta ***climate scenario analysis***
5. **Membangun kapasitas** untuk menghubungkan ***sustainability risks*** **ke dampak finansial, strategi bisnis, dan prospek perusahaan**

Data dan Metrik

1. **Inventarisasi seluruh sumber data *sustainability* dan pemilik datanya**
2. **Membangun *single source of truth* untuk data *sustainability* dan proses pengumpulan data** berkala yang konsisten dan terdokumentasi
3. **Membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh pihak dalam rantai bisnis** (digunakan untuk pengumpulan data TKBI, emisi GRK, *scenario analysis*)
4. **Mulai membangun *connected information* dengan laporan keuangan**

Menyiapkan infrastruktur dan ekosistem pendukung internal lainnya untuk penerapan keuangan Berkelanjutan.

Sumber: OJK dan PWC

Buku TKBI

https://gapura.ojk.go.id/tkbi2026

Taxonomy Navigator

https://gapura.ojk.go.id/taxonavi



Terima Kasih

Direktorat Keuangan Berkelanjutan (DUKB)
Departemen Surveillance dan SJK Terintegrasi (DSKT)
Otoritas Jasa Keuangan | 2026